

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agus Pandoan, *Teori dan Praktik Akta; Perikatan Publisitas dan Non-Publisitas*, (Yogyakarta: PT. Raga Utama Kreasi, 2017).
- Bagir Manan *et.all.*, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT. Alumni, 2017).
- Dhoni Martien, *Perlindungan Politik Hukum Kenotariatan*, (Makassar: Mitra Ilmu, 2023).
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- \_\_\_\_\_, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Atau Electronic Notary* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, (Bandung: Refika Aditama, 2012).
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 2003).
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008).
- H. Budi Untung, *Visi Global Notaris*, (Yogyakarta: Andi, 2002).
- Herry Susanto, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, (Yogyakarta: I Press, 2010).
- Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011).
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- Irwan Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003).
- Kholidah, *et.al*, *Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2011).
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan - 10, 2010).
- Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Notaris*, (Bandung: Sinar Baru, 2005).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, Cetakan ke-1, 2020).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Putri A.R, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang berimplikasi Perbuatan Pidana)*, (Medan: Softmedia).
- Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2007).

- Rochmat Soemitro, *et.all.*, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).
- Rusdianto, *et. al*, *Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris*, (Surabaya: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 2017).
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2006).
- R. Tresna, *Komentor HIR*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006).
- Sigit Sapto Nugroho, *et. all*, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006).
- \_\_\_\_\_, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999).
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Penerbit Alumni, Cetakan ke-2, 2006).
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2007).
- Universitas Pelita Harapan, *Standar Operasional Prosedur (SOP): Penulisan Tugas Akhir Thesis*, (Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2023).
- Zamaludin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-7, 2016).
- Z. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2006).

### **Jurnal**

- Ahmad Rifaldi dan Habib Adjie, “Minuta Akta Notaris dalam Bentuk Elektronik”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 6, No. 1, 717 (2020).  
DOI: <https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/issue/view/147>
- Ade Yuliany Siahaan dan Aida Nur Hasanah, “Peran Notaris sebagai Pembuat Akta Otentik dalam Proses Pembuktian di Pengadilan”, *Al-Ushrah: Jurnal Al-ahwal As-Syakhsyah*, Vol. 11, (2023).  
DOI: <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/download/16650/8030>
- Amelia Intan Saraswati, *et. al*, “Keberlakuan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Negara”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, (2023), 2069.  
DOI: <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/932>
- Aushof Albaaits, *et.all*, “Efektivitas Tanda Tangan Elektronik pada Akta yang Dibuat oleh Notaris”, *Notarius*, Vol. 16, (2023).  
DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.40263>
- Desy Rositawati, I Made Arya Utama, and Desak Putu Dewi Kasi, “Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary,” *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, No. 2, (2017), 172.  
DOI: <https://www.neliti.com/publications/243005/penyimpanan-protokol-notaris-secara-elektronik-dalam-kaitan-cyber-notary>

- Dewi Oktavia, "Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta yang Batal Demi Hukum", *Recital Review*, Vol. 3, (2021).  
DOI: <https://doi.org/10.22437/rr.v3i1.9044>
- Edwin Yoga Pratama, *et.all*, "Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik", *Notarius*, Vol. 16, (2023).  
DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.41661>
- Edmon Makarim, "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan *Cyber notary* di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 3, (2011), 466.  
DOI: <https://www.academia.edu/download/89043313/219.pdf>
- Iqbal Anshori, "Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Otentik", *Recital Review*, Vol 4, No. 2, (2022), 355.  
DOI: <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18863>
- Khairatus Sulma, *et.all*, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dan Kekuatan Pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, Vol. V, (2022).  
DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i3.7107>
- Lendo Theo Engelbert, *et. al*, "Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, (2021), 177.  
DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/um019v6i1p172-178>
- Melisa, *et. al*, "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia", *Al-Manhaj*, Vol. 5, (2023), 244.  
DOI:  
<https://www.ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2084>
- M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)", *Legalitas*, Vol. IV, (2013), 143.  
DOI: <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/117>
- Naily Zahrotun Nisa, "Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik", *Jurnal Civic Hukum*, Vol. 5, (2020), 205.  
DOI: <https://doi.org/10.22219/jch.v5i2.13909>
- Pipit Saputri Utami, "Kepastian Hukum Regulasi Tugas dan Wewenang Jabatan Notaris Dikaitkan dengan Disrupsi Teknologi Informasi dan Komunikasi", *Acta Diurnal*, Vol. 4, (2020), 147.  
DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.478>
- Putra Arifaid, "Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali", *Jurnal Hukum IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)*, Vol. 5, No. 3, (2017), 511.  
DOI: <https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.456>
- Reski Haristya Putri, *et.all*, "Legalitas Tanda Tangan Elektronik Terhadap Akta Notaris", *Notarius*, Vol. 17, (2024).

DOI:

<https://pdfs.semanticscholar.org/6eab/e9ccef592a09a444febb2d989f8f0c0eal1d.pdf>

Selvi Omiyani, Suprpto dan Saprudin, “Digitalisasi Tandatanganan secara Elektronik dengan menggunakan Akta Notaris”, Vol 3, No. 1, (2024). 20.

DOI:

<https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/download/55/49>

Tiara Jabbar Purwanto, *et.all*, “Tinjauan Yuridis Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris”, Notarius, Vol. 16, (2023).

DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.42261>

Wita Dewisari Tasya, “Analisis Keamanan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia: PT Privy Identitas Digital”, Makalah 114031: Kriptografi dan Koding, (2021).

DOI: <https://repository.privy.id/doc/CPS-PrivyID-v2.1.pdf>

Yusep Mulyana, “Aspek Hukum Penggunaan Tanda Tangan Digital Dalam Transaksi Bisnis” Universitas Pasundan Varia Hukum, Vol. 2, No. 1, (2020).

DOI: <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/article/view/12557>

Yane Mayasari, “Kedudukan Hukum Tanda Tangan Elektronik” Jurnal Teknologi Informasi (JALTI) Politeknik Praktisi Bandung, Vol. 6, No. 1, (2022).

### **Website / Internet**

AHU Online,

<https://panduan.ahu.go.id/doku.php>, diakses pada 19 Oktober 2024.

Angel Firstia Kresna, *Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pejabat Dalam Rangka Mendukung E-Government*,

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3737/legalitas-tandatanganan-elektronik-pejabat-dalam-rangka-mendukung-e-government>, diakses pada 19 Oktober 2024.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, “Penerapan *Digital Signature* Tersertifikasi, Skala Prioritas Ditjen AHU”,

<https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2728-penerapan-digital-signature-tersertifikasi-skala-prioritas-ditjen-ahu>, diakses pada 17 Oktober 2024.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Fintech” dan Tanda Tangan Elektronik”.

<https://tte.kominfo.go.id/blog/5db508bce2467517f4493af8>, diakses pada 19 Oktober 2024.

Kementerian Komunikasi dan Informatika, TTE, “Melawan Ancaman *CyberCrime* dengan Tanda Tangan Elektronik”.

<https://tte.kominfo.go.id/blog/60c33af2feb6ed3e8f0cf56d>, diakses pada 17 Oktober 2024.

- Kementerian Komunikasi dan Informatika, TTE, “Sertifikat Elektronik pada Tanda Tangan Elektronik”  
<https://tte.kominfo.go.id/blog/606ea623e4db24035ea6574d>, diakses pada 17 Oktober 2024.
- Privy, “Risiko Menggunakan Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi pada Dokumen”,  
<https://blog.privy.id/risiko-menggunakan-tanda-tangan-elektronik-tidak-tersertifikasi/>, diakses pada 18 November 2024.
- PrivyID, “Kesiapan Notaris Indonesia dalam Menyongsong *Cyber Notary*”,  
<https://blog.privy.id/kesiapan-notaris-menyongsong-cyber-notary/>, diakses pada 17 Oktober 2024.
- Rhenald Kasali, “Disrupsi Teknologi Itu Pasti”.  
[https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/19/202106526/rhenald-kasali-disrupsi-teknologi-itu-pasti#google\\_vignette](https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/19/202106526/rhenald-kasali-disrupsi-teknologi-itu-pasti#google_vignette), diakses pada 19 Oktober 2024.
- Tim detikEdu, “Asal Usul Tanda Tangan dan Sejarah Perkembangannya”,  
<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6546401/asal-usul-tanda-tangan-dan-sejarah-perkembangannya>, diakses pada 18 November 2024.

### **Hasil Penelitian**

- Agung Nugraha dan Agus Mahardika, “Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pada Sistem Elektronik Pemerintahan Guna Mendukung *E-Government*”, Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia, 2016.
- Febrian Leonardo Manuhutu, “Kedudukan Hukum Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Skripsi, Jawa Tengah: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2014.
- Jan Michiel Otto, “Kepastian Hukum yang nyata di negara berkembang (*Real Legal Certainty in Developing Countries*)”, Pustaka Larasan, 2012.
- Mahmul Siregar, “Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia”, Skripsi, Medan: Program Studi Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2010.
- Reno, “Tanggungjawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Dan Penyimpanan Minuta Akta Secara Elektronik”, Thesis, Semarang: Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 4432, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5348, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1017).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 401).

### **Kamus / Encyclopedia**

Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2024) <https://kbbi.web.id/wawancara>, diakses pada 19 Mei 2024.

### **Wawancara**

Hasil wawancara dengan Ida Asep Somara, Kepala Biro Perencanaan Kemenkumham, Kantor Kemenkumham, Jakarta, Tanggal 21 Maret 2024, Pukul 09.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Constantinus Kristomo, Direktur Badan Usaha Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kantor Direktorat Jenderal AHU, Jakarta, Tanggal 6 Desember 2024, Pukul 14.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Erick Wisan, Notaris – Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Ciputra Land, Jakarta, Tanggal 6 Desember 2024, Pukul 19.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Robbyson Halim, Pengajar Universitas Pelita Harapan, Zoom, <https://us05web.zoom.us/j/81987062182?pwd=4h02P28a5i0ua5RNMUQ4VIRNZaBQmz.1>, Jakarta, Tanggal 6 Desember 2024, Pukul 21.00 WIB.